

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Teuku Surya Darma
Indah Pranchiska
Hamam Wuryantina

Peran Penting BSN Dalam Mendorong Peningkatan Daya Saing Produk 'Halal' Indonesia

Isu Strategis

Hadirnya Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan kegiatan standardisasinya merupakan tindakan nyata perlindungan Pemerintah terhadap masyarakat konsumen dan dunia usaha atas kegiatan produksi dan transaksi pasar untuk memastikan ketersediaan produk dan jasa yang bermutu berbasis keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Jaminan mutu atas produk yang dihasilkan untuk konsumsi dalam negeri maupun tujuan ekspor yang sedemikian, adalah sebuah keharusan pada kehidupan masyarakat modern saat ini. Selain itu, BSN berperan dalam upaya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor melalui pelaksanaan tugas dan fungsi akreditasi dan satuan ukuran.

Di sisi lain, Indonesia yang tercatat memiliki penduduk Muslim dengan jumlah minimal mencapai 229.6 juta orang di tahun 2020, dapat disebut sebagai "pasar ekonomi halal" terbesar di dunia. Hal tersebut sejalan dengan laporan Indonesia Halal *Markets* periode 2021/2022 menyebutkan bahwa pembelanjaan produk halal berupa barang dan jasa tingkat domestik pada tahun 2020 mencapai USD184 miliar dan diprediksi pada tahun 2025 akan mencapai USD281.6 miliar dengan *Cumulative Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 14,96%, sebagaimana diakses dari https://isef.co.id/wp-content/uploads/2021/10/ReportIndonesiaHalal2021_2022.pdf

Sedangkan diperingkat global, laporan *State of The Global Islamic Economy* periode 2020/2021 menyebutkan bahwa potensi pembelanjaan di sektor makanan, farmasi, kosmetik, *fashion*, *tourism* dan *media* yang dikeluarkan penduduk Muslim dunia akan mencapai \$2,4 triliun pada tahun 2024 dengan CAGR selama 5 tahun sebesar 3,1%, sebagaimana diakses <https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/456642acf95a783db590e5b104cae94046047101.pdf>. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai pembelanjaan tersebut belum mewakili nilai sebenarnya dari produk bersertifikat 'halal' konsumsi. Dengan perkataan lain, terciptanya potensi besar bagi investasi dan penciptaan merek makanan halal global, seiring sejalan dengan meningkatnya populasi dan kesadaran untuk mengkonsumsi/menggunakan produk halal oleh muslim dunia.

Oleh karena itu, jaminan ketertelurusan dan keberterimaan produk halal Indonesia berbasis pada standar internasional adalah sebuah keniscayaan. Melalui ketersediaan dan pemanfaatan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN), terutama pada salah satu pilarnya yaitu metrologi dimana tugas dan wewenangnya terdapat pada Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)-BSN diharapkan mampu memastikan bahwa produk dan layanan yang diselenggarakan BSN dapat memenuhi kebutuhan pengguna, pembuat, dan regulator.

2022

Komisi VI

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK RI terkait efektivitas pengelolaan standarisasi dan akreditasi pada tahun 2020-2021 yang diselenggarakan BSN menyebutkan adanya permasalahan yang akan mempengaruhi efektivitas kegiatan layanan kalibrasi dan pengukuran pada Laboratorium SNSU-BSN. Permasalahan tersebut di antaranya adalah pengadaan peralatan Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, dan Laboratorium SNSU lainnya pada tahun 2020 dan 2021 belum dapat dimanfaatkan dengan alasan yang beragam; dan terdapat dua Laboratorium SNSU-BSN belum memiliki kemampuan pengukuran dan kalibrasi (CMC) oleh *Bureaud International des Poids et Mesures* (BIPM). Bahkan pelayanan kalibrasi dan pengukuran di SNSU-BSN belum dilaksanakan dengan waktu yang optimal pada pelaksanaan cek fisik UUT, cek fungsi UUT, pelayanan kalibrasi dan pengukuran, serta penerbitan sertifikat kalibrasi dan penerbitan tagihan melalui SIMPONI.

Padahal diketahui bahwa selama tahun 2020 s.d Triwulan III tahun 2021, Kedepuyan Bidang SNSU telah menerbitkan sebanyak 1.724 sertifikat kalibrasi. Namun demikian, adanya berbagai permasalahan yang terjadi, tentu akan sangat mempengaruhi efektivitas capaian atas tujuan pengelolaan pelayanan Kalibrasi oleh SNSU dalam mendukung peningkatan daya saing industri untuk tujuan ekspor bernilai tambah tinggi maupun penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Saran Rekomendasi

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka DPR RI dalam hal ini Komisi VI perlu mendorong percepatan penyelesaian atas ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur peralatan pada laboratorium-laboratorium yang dikelola Bidang SNSU-BSN. Terutama pada peralatan dan laboratorium untuk pengujian Mikrobiologi DNA Halal sebagai prasyarat utama dalam menghasilkan kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dapat terjamin kebenarannya dan diakui di tingkat internasional.

Hal yang juga tidak kalah penting adalah Komisi VI DPR RI dapat mendorong BSN untuk melakukan pengembangan Sistem Informasi pelaksanaan akreditasi yang mencakup seluruh proses bisnis akreditasi. Dimana sesungguhnya, hasil pengukuran dengan menggunakan peralatan dan laboratorium yang tidak optimal dan tidak memadai serta tidak konsisten akan berdampak langsung terhadap kualitas dan daya saing produk.

Dengan itu, peran penting BSN melalui SNSU dalam menghadirkan kegiatan akreditasi dan sertifikasi halal berbasis standar secara berkelanjutan serta kepatuhan atas sistem yang terintegrasi sesuai dengan mandat UU 33 Tahun 2014 dan UU 20 Tahun 2014 akan mampu mendorong peningkatan daya saing Produk Halal Indonesia. Sekaligus akan benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya.